



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 UU NO. 44 TAHUN 2008: TINJAUAN KONSTITUSIONAL ...	3
A. Undang-Undang tentang Pornografi dan Pancasila	3
B. Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945	4
C. Pasal 28J, Pasal 28I, dan Pasal 28E UUD Tahun 1945 ...	8
BAB 3 UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN KUHP	19
A. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Ketentuan Larangan Pornografi dalam KUHP ...	19
B. Larangan Pornoaksi	22
C. Pengecualian Pembuatan, Pemilikan, atau Penyimpanan Pornografi sebagai Hak Individu	23
D. Istilah "Dapat Membangkitkan Nafsu Birahi"	25
E. Batasan-Batasan Istilah dalam Undang-Undang tentang Pornografi	30
F. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	31

BAB 4	UU NO. 44 TAHUN 2008 DALAM NEGARA BERDASARKAN PANCASILA DAN KONSEP “NEGARA TANPA PENJARA”	34
	A. Konsep Hazairin Mengenai Negara Tanpa Penjara	34
	B. Pendahuluan	34
	C. Pembahasan	40
	D. Pengecualian Pembuatan, Pemilikan, Penyimpanan, dan Penggunaan Pornografi	64
BAB 5	PORNOGRAFI UNTUK TUJUAN DAN KEPENTINGAN PENDIDIKAN	110
	A. Pendahuluan	110
	B. Unsur Pihak yang Dapat Melakukan Perbuatan “Membuat ”Pornografi untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan	119
	C. Unsur yang Dapat Dijadikan Objek atau Model yang Mengandung Muatan Pornografi yang Ditujukan untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan	123
	D. Unsur Muatan Pornografi yang Ditujukan untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan	126
	E. Tempat atau Lokasi Penggunaan Pornografi untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan	131
	F. Penyebarluasan Produk Pornografi yang Ditujukan untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan	133
BAB 6	PORNOGRAFI UNTUK TUJUAN DAN KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN	136
	A. Pendahuluan	136
	B. Pornografi untuk Terapi Kesehatan Seksual	137
	C. Pornografi untuk Tujuan dan Kepentingan Pelayanan Kesehatan	142

BAB 7	PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG TERKAIT ATAS KASUS PORNOGRAFI	151
A.	Jika Terjadi Penyebarluasan Pornografi yang Memuat “Persenggamaan”, Peraturan Perundang-undangan Apa yang Dapat Diterapkan terhadap Para Pelaku?	151
B.	Apabila Pornografi yang Dibuat pada Masa Sebelum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Berlaku, Kemudian Penyebarannya Terjadi pada Masa Setelah Undang-undang Tersebut Berlaku, Apakah terhadap Orang yang Membuat dan yang Berperan sebagai Pelaku Pornografi Dapat Diterapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?	236
C.	Pornografi yang Memuat Persenggamaan yang Dilakukan oleh Pasangan yang Tidak dalam Ikatan Perkawinan, Apakah Dapat Dikategorikan sebagai “Tidak Termasuk untuk Dirinya Sendiri dan Kepentingan Sendiri” Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?	253
D.	Apabila Pelaku Mendapat File Pornografi pada Masa Sebelum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Berlaku dengan Cara Mengambil dari File Milik Orang Lain, Ketentuan Apa yang Dapat Diterapkan kepada Pelaku?	304
E.	Apabila Pelaku Mengakses Pornografi pada Masa Sebelum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Berlaku, Kemudian “Memberitahu” Pihak Lain pada Masa Setelah Undang-Undang Pornografi Berlaku, Pasal Apa Serta Kejahatan Apa yang Dilakukan Pelaku?	320

F. Penyebaran Pornografi di Internet dan Media Lainnya karena Pornografi Diambil oleh “Pihak Lain” dari Perangkat Elektronik Milik “Pelaku Pengakses Awal” atau “Pengambil Awal”, Pasal Apa yang Dapat Diterapkan terhadap Pelaku Awal?	332
---	-----

BAB 8 PENUTUP	362
----------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA	365
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	369
-----------------------	------------

PROFIL PENULIS	389
-----------------------------	------------